

THE ROLE OF LIEUTENANT GENERAL TNI PURN SYARWAN HAMID IN THE 1998 - 1999 REFOR

M Mulya Hendra, * Drs. H. Ridwan Melay, M.Hum. Bunari, M.Si*****

Email: m.mulyahendra@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com

No HP 081364358874

**History Education Studies Program
Education Department of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau**

Abstract: *The background of this thesis is to know the role of Lieutenant General TNI Purn Syarwan Hamid in supporting the demands of the students behind the shift of the New Order to the Reform, whereby he served as Vice Chairman of the House of Representatives / Representative representatives of the Armed Forces (FABRI). The aims of this research are: (1) Knowing the life history of Lieutenant General TNI Purn Syarwan Hamid (2) Knowing the role of Lieutenant General TNI Purn Syarwan Hamid in the reform of 1998 - 1999 (3) To find out what ever in the struggle of Lieutenant General TNI Purn Syarwan Hamid for Riau Province when he served as Minister of Home Affairs RI 1998 - 1999 Development Reform Cabinet. The method used in this research is the method of historical research, because this research takes the object of events that occurred in the past. In addition to historical research methods (history), the author also uses biographical analysis techniques, this technique is a method of analyzing one's life history. The results obtained that the role of Syarwan Hamid in reform can be seen in two dimensions. The first dimension concerns Syarwan's political role and choice as the reform movement begins to roll. Second, the role of Syarwan in the position of Minister of Home Affairs Mr. Syarwan Hamid who is the Vice Chairman of the House of Representatives Faction as a person who finalizes the reform movement to achieve political success. Mr. Syarwan also gave the students the opportunity to keep occupying the DPR / MPR building while taking action to discuss accepting student demands In the lead up to the reformation, Pak Syarwan also received the nods of action from various universities in Jakarta to agree on the strategy of occupying the parliament building safely and effectively*

Keywords: *Roles, People, Reform, Syarwan Hamid*

PERANAN LETNAN JENDERAL TNI PURN SYARWAN HAMID DALAM REFORMASI 1998 – 1999

M Mulya Hendra, * Drs. H. Ridwan Melay, M.Hum. Bunari, M.Si*****

Email: m.mulyahendra@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com

No HP 081364358874

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Latar belakang skripsi ini adalah mengetahui peran Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid dalam mendukung tuntutan mahasiswa dibalik peralihan peristiwa orde baru ke reformasi, dimana saat itu ia menjabat sebagai wakil ketua DPR/MPR RI perwakilan Fraksi ABRI (FABRI). Tujuan dalam Penelitian ini adalah (1) Mengetahui riwayat hidup seorang tokoh Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid (2) Mengetahui peranan Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid dalam reformasi tahun 1998 – 1999 (3) Untuk mengetahui apa yang pernah di perjuangkan Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid untuk Provinsi Riau ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI 1998 - 1999 Kabinet Reformasi Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa- peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Selain metode penelitian historis (sejarah), penulis juga menggunakan teknik analisis biografi, teknik ini adalah metode menganalisis sejarah hidup seseorang. Hasil penelitian yang didapat bahwa peranan Syarwan Hamid dalam reformasi dapat dilihat dalam dua dimensi. Dimensi pertama, menyangkut peran dan pilihan politik Syarwan saat gerakan reformasi mulai menggelinding. Kedua, peranan Syarwan dalam posisi sebagai Menteri Dalam Negeri Pak Syarwan Hamid yang merupakan Wakil Ketua DPR Fraksi ABRI sebagai orang yang mematangkan gerakan reformasi untuk mencapai keberhasilan politik. Pak Syarwan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap menduduki gedung DPR/MPR saat melakukan aksi untuk berdiskusi menerima tuntutan mahasiswa. Menjelang reformasi terjadi, Pak Syarwan juga menerima simpul-simpul masa aksi dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta untuk menyepakati strategi pendudukan gedung parlemen dengan aman dan efektif

Kata kunci : Peranan, Tokoh, Reformasi, Syarwan Hamid

PENDAHULUAN

Memasuki dasawarsa 1990-an, Pemerintahan Orde Baru mulai menampakkan kekurangan-kekurangannya yang mendapat kritik tajam, karena pemerintahan yang terlalu sentralistis, serta munculnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara signifikan. Tetapi, semua kritikan tersebut tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan saat itu. Sementara dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, tampak pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan dalam laporan tahunan 1997, Bank Dunia masih meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat rata-rata 7,8 persen. (*Habibie, 2006:1-2*).

Gelombang bersejarah di era tahun 1998 mungkin merupakan peristiwa yang tak terlupakan bagi bangsa Indonesia, sebab ketika itu kondisi Indonesia berada pada posisi yang sulit berkepanjangan. Berawal pada krisis moneter yang terjadi dimana jatuhnya nilai kurs rupiah pada posisi Rp. 17.000 per US\$1 pada bulan Januari. Disusul dengan gelombang aksi mahasiswa yang bermula di Yogyakarta, Surabaya, Padang, Ujung Pandang (Makassar). Kemudian virusnya menyebar ke kota-kota lain di penjuru tanah air. (*Nugroho dkk, 2013:18*).

Sejak krisis moneter Juli 1997, gegap gempita dan dinamika kehidupan kampus secara perlahan-lahan bertumbuh dan berkembang bagai cendawan di musim hujan di seluruh pelosok Nusantara. Beban berat kehidupan masyarakat tersebut ditambah dengan ketidakpuasan terhadap terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan yang ketujuh kali. Dominasi partai politik tertentu dan terlalu kuatnya eksekutif yang didukung angkatan bersenjata menjadi kekuatan sinergis untuk membendung kran demokrasi di Republik ini. Pemasungan kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM, telah menjadi fenomena gunung es yang menyimpan bara konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, konflik terpendam antar etnis dan antar agama telah menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Kegagalan pemerintahan Soeharto dalam mengawal keamanan perekonomian nasional menjadi pemicu ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah.

Dibalik peralihan peristiwa orde baru ke reformasi, Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid memiliki peran yang menonjol dalam mendukung tuntutan mahasiswa, saat itu ia menjabat sebagai wakil ketua DPR/MPR RI perwakilan Fraksi ABRI (FABRI). Senin, 18 Mei 1998 para mahasiswa yang tergabung dalam masa aksi bergerak menuju Gedung DPR/MPR untuk melaksanakan audiensi kepada ketua DPR/MPR, Harmoko. Dengan menggunakan almamater kebanggaan kampusnya, para mahasiswa menuntut perbaikan kondisi bangsa yang mulai hancur. Dengan izin Pak Harmoko, Syarwan dipersilahkan untuk menyambut langsung kedatangan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada DPR/MPR sebagai wakil rakyat.

Dalam pertemuan itu, salah seorang perwakilan mahasiswa menanyakan kepada pak Syarwan yang inti pertanyaannya “ Bagaimana cara terbaik melengserkan Pak Harto? “ menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa tersebut, Syarwan memberikan buah pikiran sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan mahasiswa dengan 2 opsi, Pertama, melalui Sidang Istimewa. Dalam sidang itu menuntut mencabut mandat Pak Harto sebagai Presiden. Kedua, melalui tekanan gerakan mahasiswa yang semakin membesar kemudian berpadu dengan kekuatan-kekuatan masyarakat lain. Aspirasi itu akan di tangkap oleh pimpinan dewan

atau legislative, maka pimpinan dewan bisa mengusulkan kepada Pak Harto untuk lengser dari kursi presiden.

Tujuan dalam Penelitian ini adalah (1) Mengetahui riwayat hidup seorang tokoh Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid (2) Mengetahui peranan Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid dalam reformasi tahun 1998 – 1999 (3) Untuk mengetahui apa yang pernah di perjuangkan Letnan Jenderal TNI Purn Syarwan Hamid untuk Provinsi Riau ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI 1998 - 1999 Kabinet Reformasi Pembangunan.

Tinjauan Teoritis. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Teori tokoh nasional Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat disebabkan oleh lima hal yaitu:

Pertama, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohnya, ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

Kedua, memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinya. Ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal.

Ketiga, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah - sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.

Keempat, ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.

Kelima, usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilatullahim, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa- peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Louis Gottschalk dalam bukunya *Understanding History: A Primer of Historical Method* dikutip dari jurnal Louis O. Mink, menjelaskan bahwa metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Mink, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian historis adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta atau dokumen yang disusun secara sistematis, dari evaluasi yang objektif dari data yang berhubungan dengan kejadian masa lampau untuk memahami kejadian di masa lalu.

Selain metode penelitian historis (sejarah), penulis juga menggunakan teknik analisis biografi, teknik ini adalah metode menganalisis sejarah hidup seseorang. Menurut Burhan Bungin, dalam teknik biografi ini objek kajiannya adalah orang tersebut dan seluruh pengalaman hidupnya, mulai dari kelahirannya, menjadi dewasa, sampai dengan masa tuanya, bahkan sampai orang tersebut meninggal dunia. Analisis biografi menggunakan analisis deskripsi untuk mengungkapkan domain-domain sejarah penting dan jati diri seseorang yang menjadi objek analisis, domain-domain tersebut antara lain, seperti: (1) Identitas diri, keturunan, dan keluarga; (2) Perkembangan hidup semasa kecil dan orang-orang yang mempengaruhinya; (3) Sejarah pendidikan dan masa pertumbuhannya menjadi dewasa; (4) Sejarah pekerjaan dan reputasi; (5) Ideologi agama dan masyarakat yang mempengaruhinya; (6) Ajaran-ajaran moral yang diperjuangkan; serta (7) Harapan-harapan untuk masyarakat yang akan datang.

Metode ini mengandalkan kemampuan penulis biografi untuk mengungkapkan fakta-fakta sejarah pribadi objek analisis dengan sejelas-jelasnya tanpa berniat menyembunyikan sesuatu hal (yang terburuk sekalipun) yang pernah terjadi. (**Bungin, 2007: 241-242**)

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data antara lain : (1) Teknik Studi Perpustakaan : yaitu tehnik yang di gunakan untuk landasan teori. Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dari buku-buku Perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. (**Sumadi Surya Brata,1982:15**) Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa penulis dalam penelitian ini langsung mempelajari buku-buku, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah ini baik yang bersifat lokal, nasional, maupun yang bersifat internasional, terbatas pada sumber yang ditemukan. (2) Teknik Wawancara : Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. (**Jujun. S. Suria Sumantri,1969:192**)

Analisis Data yang digunakan penulis yaitu menggunakan analisa kualitatif Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi

Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan (lama) diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan masa depan. Selain itu juga menekankan kembali pada bentuk asal dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik-praktik yang salah dengan melakukan perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun bidang pendidikan. Reformasi adalah suatu gerakan sosial yang berupaya memperbaiki tatanan masyarakat secara keseluruhan dengan mengubah beberapa aspek struktur sosial. **(Rodney Strark, 1989 : 543)**

B. Sebab Munculnya Gerakan Reformasi

1. Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila

2. Krisis Moneter

Reformasi yang terjadi di Indonesia bermula dari krisis moneter yang menyebabkan jatuhnya nilai Rupiah. Krisis moneter tersebut dimulai bulan Juli 1997. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai rupiah melemah dari Rp. 2.575,00/US \$ menjadi Rp. 2.603,00/US\$. Minggu kedua Oktober 1997, kurs dollar mencapai Rp. 3.845,00/US\$ dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya menjadi Rp. 17.000,00/US\$. **(Irsed, 1999 : 72)**

3. KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)

Tanggal 10 maret, wakil rakyat di MPR memilih Soeharto sebagai Presiden untuk yang ketujuh kalinya, periode 1998 - 2003. Sebagai Wakil Presiden ditunjuk BJ Habibie, dan beberapa hari setelah itu terbentuklah kabinet terbaru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan VII. Keluarga dari Presiden banyak masuk dalam jajaran sebagai Menteri dalam Kabinet Pembangunan VII. Putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana diangkat sebagai Menteri Sosial, sementara rekannya Mohammad (Bob) Hasan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

4. Krisis Hukum

Krisis ini bukan lagi merupakan penurunan nilai rupiah melainkan sudah menuju pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pak Harto. Hampir di seluruh bidang kehidupan telah terkena dampak dari krisis kepercayaan yang luar biasa. Di bidang hukum misalnya, hukum telah menjadi politik kekuasaan, sehingga jaminan keadilan dan kebenaran seolah-olah hanya merupakan sebuah mimpi. Aturan hukum disalah gunakan seenaknya sendiri demi menjaga stabilitas kekuasaan.

5. Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

C. Munculnya Gerakan Mahasiswa

Bulan April 1998, gerakan mahasiswa berulang-ulang menjadi berita media massa di tanah air, Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, dengan jaket almamaternya masing-masing, bergabung menjadi satu, Berbagai aksi keprihatinan berulang-ulang digelar, mulai dari Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai ke Ujungpandang, Berbagai universitas negeri terkemuka terlibat, seperti UI, ITB, UGM ditambah beberapa universitas swasta lainnya, Slogan yang dikumandangkan pun beragam, namun seputar reformasi ekonomi dan politik.

D. Kronologi Sebelum Reformasi

1. Sebelum Sidang Umum MPR

Jum'at 16 Januari 1998 Sekitar 500 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi atas keprihatinan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Kamis 19 Februari 1998 Sekitar 1000 mahasiswa Universitas Indonesia berjalan kaki mengitari kampus UI Depok, Jawa Barat. Mereka meminta agar pemerintah menyediakan bahan kebutuhan pokok yang lebih murah dan segera mengatasi pengangguran yang sedang marak di Indonesia

Rabu 25 Februari 1998 Prof Dr Mahar Mardjono, mantan Rektor UI dan Prof Dr Sri Edi Swasono, dosen UI bergabung dengan mahasiswa Universitas Indonesia pada aksi keprihatinan yang di prakarsai Ikatan Alumni UI (Iluni) di kampus UI Salemba, Jakarta. Sebuah pernyataan keprihatinan civitas akademika UI dibacakan oleh Ketua Umum Iluni, Hariadi Darmawan, dihadapan ratusan civitas akademika UI. Krisis ekonomi di Indonesia selama delapan bulan terakhir telah menyengsarakan rakyat.

Senin 2 Maret 1998 Sidang Umum MPR 1998 sedang berlangsung di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung bentrok dengan aparat keamanan. Para mahasiswa hendak melakukan long march dari Kampus Universitas Padjajaran (Unpad) ke gedung DPRD Tingkat 1 Jawa Barat. Tetapi aparat keamanan

mencegah mereka, sehingga timbul bentrokan fisik di gerbang Kampus, akibatnya 2 mahasiswa luka-luka dalam aksi tersebut.

2. Dialog Mahasiswa, Pemerintah dan ABRI

Rabu-Kamis 11-12 Maret 1998 Kekisruhan dan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan terjadi di kampus IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Di UI digelar pula aksi keprihatinan. Dihadiri pula oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Amien Rais. Ribuan mahasiswa UI pada rapat akbar di depan Balairung Kampus UI Depok, Jakarta, menyambut meriah Amien Rais.

Rabu 1 April 1998 Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung disejumlah kampus, dengan tuntutan yang belum berubah, yaitu seputar pelaksanaan reformasi ekonomi dan politik. Kamis 2 April 1998 Aksi keprihatinan mahasiswa memasuki babak baru, yaitu beranjak keluar kampus. Akibatnya, di beberapa kampus yang melakukan aksi unjuk rasa, bentrokan dengan aparat keamanan tidak bisa di hindari dan mengakibatkan korban luka-luka di pihak mahasiswa.

Jum'at 3 April 1998 Menanggapi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan dalam aksi-aksi keprihatinan di kampus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar mengemukakan, mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya jangan sampai melupakan fungsi orang lain. ABRI dalam hal ini akan selalu mengacu pada fungsinya sebagai penjaga keamanan dan stabilitas keamanan. "masing-masing orang punya fungsi sendiri, jangan sampai itu tidak dimengerti" kata Arismunandar kepada wartawan usai menerima rektor IKIP Negeri se-Indonesia di ruang kerjanya, menurutnya dengan cara itu norma-norma pendidikan dapat terpelihara.

Sabtu 4 April 1998 Sementara di Yogyakarta, muncul reaksi dan protes keras atas kekerasan terhadap aksi mahasiswa dikampus. Rektor UGM Yogyakarta Prof. Dr. Ichlasul Amal menyatakan reaksi aparat keamanan terhadap aksi keprihatinan mahasiswa Yogyakarta sudah berlebihan, menyebabkan puluhan mahasiswa terluka serta rusaknya berbagai fasilitas di kampus UGM. Aksi keprihatinan Sabtu 4 April dihadiri lebih dari 25.000 mahasiswa dan barisan siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) Yogyakarta, yang tergabung dalam Gapci (Gabungan Pelajar Cinta Indonesia) dengan panji-panji OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).

Minggu 5 April 1998 Dosen Fisipol-UGM Yogyakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais mengatakan, aksi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi harus ditangani secara tepat. Larangan terhadap mahasiswa dikhawatirkan malah akan kontraproduktif. Menurut Amien, "demo mahasiswa dikampus menuntut perbaikan ekonomi, menuntut reformasi, sama sekali bukan politik praktis, tetapi politik tinggi (high politics), yakni politik dalam tatanan etika dan moral yang tidak bisa lagi berdemonstrasi di kampus, mereka akan mencari saluran lain yang semakin tidak terkendali dan menuju kepada anarkis," kata Amien. Dia menambahkan, aksi mahasiswa dengan sendirinya akan mereda dan menghilang apabila pemerintah berhasil mengatasi krisis moneter

PERAN LETNAN JENDERAL TNI PURN SYARWAN HAMID DALAM REFORMASI 1998 – 1999

Syarwan Hamid adalah anak keempat dari lima bersaudara. Beliau lahir di dusun Pusake, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10

November 1943 dari pasangan Abdul Hamid dan Cik Mas. Orang tuanya merupakan pedagang kain.

1. Peran dan Pilihan Politik Syarwan Hamid dalam Gerakan Reformasi

Syarwan sudah menampakkan perbedaan dalam pemikiran tentang reformasi dalam dialog nasional yang dilaksanakan di Pekan Raya Jakarta (PRJ). Acara yang diselenggarakan ABRI ini dihadiri para anggota Kabinet Pembangunan VII dan para mahasiswa. Yang hadir diantaranya mendagri R. Hartono, Mensos. Siti Hardijanti Rukmana, Mendikbud Wiranto Aris Munandar, Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Walaupun sebagian para aktivis mahasiswa menolak hadir dalam acara tersebut. Syarwan dalam acara tersebut mengatakan tentang perlunya ketegasan sikap ABRI terhadap reformasi yang sedang berlangsung. Bahwa ABRI menurut Syarwan, harus sesuai dengan sumpah prajurit yaitu kesetiaan ABRI hanya kepada negara, bukan kepada pemerintah.

Salah satu peran menonjol yang Syarwan mainkan adalah menyokong proses pendudukan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga proses pengumpulan massa mahasiswa terwujud. Jumlah peserta aksi yang tak tertandingi oleh aksi mobilisasi massa lain yang pernah ada selama 32 tahun terakhir di negeri ini. Setidaknya, ada empat petunjuk ke arah pembuktian peran itu.

Pertama, Syarwan telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap menduduki gedung DPR/MPR, saat Soeharto hendak mengalihkan isu pergantian kepemimpinan yang dituntut mahasiswa -sebagai bagian dari paket reformasi versi mahasiswa- ke agenda reformasi yang dipimpin oleh Soeharto sendiri dengan *bargain reshuffle* kabinet serta pembentukan komite reformasi.

Kedua, Syarwan pula yang menerima simpul-simpul massa aksi dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta untuk menyepakati strategi pendudukan gedung parlemen dengan aman dan efektif. Syarwan menerima utusan FKSMJ diantaranya adalah Henri Basel (IKIP Jakarta), Indra (Yarsi), Ali Imron (PTIQ), Irwan (Univ. Moestopo Beragama), Rama Pratama (UI), Sarbini (Untag) dsb.

Ketiga, dari bahan yang dimiliki Sinansari Ecip diperoleh kabar tentang menonjolnya peran Syarwan dalam membantu gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa, khususnya pada saat-saat menjelang Soeharto *lengser*.

Keempat, Syarwan pun *getol* menerima tamu dari kalangan masyarakat (elit politik, ormas atau pun cendekia) yang memiliki aspirasi yang sama dengan mahasiswa).

Beberapa kali pak Syarwan menemui mahasiswa aksi untuk berdialog. Pada umumnya isu yang mereka kemukakan nyaris serupa. Aspirasinya semakin mengkristal agar Presiden Soeharto segera lengser dari jabatannya serta mendesak parlemen untuk menggelar Sidang Istimewa. Menanggapi hal ini pihak MPR kembali menyampaikan surat kepada Presiden.

Pada kesempatan lain ia telah memperlihatkan kesepakatan lebih jauh dengan agenda reformasi. Ia kini menyetujui adanya aksi-aksi massa yang dia ekspresikan secara verbal, meski disarankan dilakukan tidak di luar kampus. Isyarat seperti ini menarik untuk dikaji, karena bila ABRI secara kelembagaan dari awal memang bersungguh-sungguh mau bergabung dengan aktivis mahasiswa guna bersama-sama mewujudkan tuntutan dilaksanakannya agenda reformasi, bisa diprediksikan Soeharto

telah *lengser* jauh sebelum 21 Mei 1998. Namun, seperti kita ketahui, TNI dari awal-awal memang *pro status quo*, karena lewat Wiranto mereka telah menolak dimundurnya Soeharto dari kursi presiden.

2. Orde Transisi, Elit, Kekuasaan dan Lengsernya Soeharto

Peran Syarwan di era gerakan pro reformasi mengkonsolidasikan diri, sampai ke detik-detik terakhir menjelang keberhasilan politik kelompok tersebut melengserkan Soeharto. Mengapa membahas posisi Syarwan penting? Tentu saja, karena bagaimanapun selalu menarik untuk kita cermati, jika ada elit politik yang tumbuh dari mekanisme politik patron-klien di era Orde Baru namun dapat bertahan menjadi salah satu elit politik yang cukup berpengaruh di era reformasi, sebuah era yang dibuat oleh pencetusnya sebagai anti tesis dari orde sebelumnya yang sangat korup.

Syarwan Hamid dalam kenyataannya bukan hanya sekedar elit politik yang lahir dari proses rekrutmen politik dalam tubuh militer, lembaga yang terkenal sangat loyal pada Soeharto, sang patron tertinggi. Posisi Syarwan sangat unik, baik jika dikaitkan dengan masa lalunya maupun peran apapun yang dilakukannya selama reformasi. Dikaitkan dengan masa lalu, ia bagian dari orde sebelumnya dibawah kepemimpinan Soeharto.

Untuk lebih mempermudah menganalisa fenomena diatas, setidaknya ada beberapa alternatif asumsi jawaban yang bisa kita sodorkan guna menjelaskan mengenai hal yang menyebabkan bertahannya seorang elit politik dalam hal ini Syarwan Hamid pada kurun dua pemerintahan yang saling bertolak belakang ide dan agenda politiknya.

Pertama, bisa jadi tanpa diketahui banyak orang, sesungguhnya Syarwan adalah salah satu motor utama yang menjadi penggerak bagi proses kemunculan reformasi sebagai sebuah gerakan politik. Sehingga logis bagi siapapun berhasil duduk pada posisi penting di rezim berikutnya akan memperhitungkan dirinya.

Kedua, bisa jadi karena di era sebelumnya Syarwan tidak memiliki kesalahan politik yang begitu fatal terhadap kalangan reformis dan Syarwan sendiri bersikap netral ketika gerakan pro reformasi belum menunjukkan gejala keberhasilan politik, menyebabkan ia tidak termasuk elit politik yang diagendakan untuk disikat oleh kalangan reformis. Paling tidak Syarwan tidak termasuk elit rezim lama yang dianggap menghalang-halangi gerakan mereka.

Ketiga, mungkin juga meski bukan termasuk penggerak utama, Syarwan memiliki andil bagi konsolidasi, pematangan, atau proses finishing touch dari maneuver politik yang digelar oleh kelompok pro reformasi menuju keberhasilan politik melengserkan Soeharto.

Akibatnya, Syarwan tidak di usik posisinya dalam tubuh Negara, sebaliknya justru diberi kesempatan untuk menduduki posisi cukup penting secara politik sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi kelompok *status quo* yang masih banyak di tubuh Negara. Kenyataan bahwa Syarwan adalah tokoh militer yang kenyang berkecimpung di dunia politik (mantan Kassospol) menyebabkan ia bisa dianggap mampu mengimplementasikan agenda politik kelompokreformis dari dalam tubuh Negara, sesuai dengan teori dari Huntington tentang tipe transisi menuju demokrasi yang berjalan melalui pola kerjasama antara kalangan reformis di tubuh Negara dengan kalangan reformis di tubuh rakyat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis simpulkan bahwa :

1. Pak Syarwan Hamid yang merupakan Wakil Ketua DPR Fraksi ABRI sebagai orang yang mematangkan gerakan reformasi untuk mencapai keberhasilan politik
2. Pak Syarwan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap menduduki gedung DPR/MPR saat melakukan aksi untuk berdiskusi menerima tuntutan mahasiswa
3. Menjelang reformasi terjadi, Pak Syarwan juga menerima simpul-simpul masa aksi dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta untuk menyepakati strategi pendudukan gedung parlemen dengan aman dan efektif.

Rekomendasi

Dari pembahasan mengenai sebab konflik dan penelitian mengenai dampak dari konflik perbatasan wilayah lima desa, maka dirumuskan rekomendasi yaitu:

1. Sebagai manusia yang bersejarah, hendaknya kita perlu belajar dari peristiwa sejarah, karena sejarah adalah guru yang terbaik bagi kita untuk maju. Reformasi sebagai tonggak perubahan di Indonesia banyak memberikan pelajaran untuk kita makna sebagaimana banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang masa itu, bahkan nyawapun dikorbankan untuk meraih reformasi di Indonesia.
2. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Syarwan Hamid sebagai Kasospol ABRI, Wakil Ketua DPR Fraksi ABRI serta Menteri Dalam Negeri (1998-1999) memberikan pelajaran bagi kita bahwa kepentingan rakyat harus diperjuangkan, sekalipun itu menentang pemerintahan yang berkuasa. Hal inilah yang dialami langsung oleh Pak Syarwan walau apa yang beliau perjuangkan itu berbeda pendapat dengan institusi beliau (ABRI)
3. Semua permasalahan yang dihadapi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu demi tercapainya suatu penyelesaian yang baik, jangan pernah kita muda diadu dombakan bahkan dipecah belahkan oleh orang asing.
4. Inti kandungan gerakan reformasi adalah menuntut perubahan yang mana menuntut perubahan system dalam pemerintahan agar tidak terjadinya ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ar-ruzz Media : Jogjakarta.
- A, Denny J. 2006. *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Penerbit LKIS Yogyakarta
- Aoer, dkk. 1998. *Aksi Mahasiswa Reformasi Total*, Mentari Nusantara.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group
- Effendy, Farhan. 2000. *Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme*. Penerbit Inside Jakarta
- Habibie, B.J. 2006. *Detik-Detik Yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. THC Mandiri.
- Irsed. 1999. *Dari Orde Baru Ke Orde Reformasi Syarwan Hamid*. Sumer Widya Offset.
- Miftahuddin. 2014. *Kuntowijoyo Dan Pemikirannya: Dari Sejarawan Sampai Cendekiawan*
- Mink, O Louis. 2013, *The Outonomy of Hidtorycal Understanding*. JSTOR Digital Library of Academic Journals. New York
- Nugraha, dkk. 2013, *Jenderal di Gelombang Reformasi*.
- Nugroho, Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Yayasan Penerbit UI Jakarta Offset
- Polak, Mayor, 1979, *Sosiologi: Suatu Pengantar Ringkas*.. Penerbit PT Ichtiar Baru Jakarta
- Selo, Soemarjan. 2011. *Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi*. Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof Dr Denys Lombard. Penerbit Obor. Jakarta
- Setiawan, Akhmad. 1998. *Perilaku Birokrasi dalam Penguasa Paham Kekuasaan Jawa*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta

Shadily, Hasan. 1986. *Reformasi*. Encyclopedi Indonesia. Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 5

Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Pt Raja Grafindo Persada; Jakarta

Stark, Rodney. 1989. *Sociology*. Wadsworth Publishing California.

Tarmidi, Lepy T (Wakil Kepala Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia). *Krisis Moneter Indonesia Sebab Dampak Peran IMF dan Saran*

Udik Budi Wibowo: *Teori Kepemimpinan* (BKD Kota Yogyakarta, 14 Juni 2011)

Zon, Fadli. 2004. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Yayasan Penerbit Institute for Policy Studies Jakarta

Skripsi

Hayati, S. 2015. *Peranan Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam Mengembangkan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada Tahun 1928-1949*. Skripsi tidak dipublikasikan. UR. Pekanbaru.

Mumuh, Mukhtar. 2012. *Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kecamatan Cipedes Kota Tasik Malaya 1947 – 2000*. Repository UPI. Bandung.

Pratama, Rinaldo Adi. 2015. *Kuningan Pada Masa Revolusi: Ciwaru Sebagai Pusat Keresidenan Cirebon Tahun 1947-1950*. Repository UPI. Bandung.

Sofiyatun, T. 2015. *Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak Melalui Keterampilan Sablon*. Eprints, UNY. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang *Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam*

Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:BJ_Habibie_melantik_Kabinet_Reformasi_Pembangunan_23_Mei_1998.png&filetimestamp=20150703110317&